

## Wah! KPK Panggil 2 PNS Kemenkeu Pekan Depan, Siapa Nih?

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil dua nama pejabat di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pekan depan. Ini masih terkait dengan kasus pamer harta dan data LHKPN. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, dua nama yang dipanggil pekan depan itu ialah Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro. "Minggu depan terjadwal Selasa - Kamis saudara Andhi Pramono, dengan saudara Wahono akan kita undang untuk kita mintakan klarifikasi minggu depan," ujar Pahala saat ditemui di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (10/3/2023). Khusus untuk Wahono, Pahala menjelaskan, panggilan klarifikasi dilakukan karena istrinya terlibat dalam kepemilikan saham perusahaan yang dipegang istri mantan pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT). Adapun proses penanganan kasus Rafael di KPK telah naik ke tahap penyelidikan dari sebelumnya hanya tahap klarifikasi. KPK menyelidik dugaan tindak pidana korupsi oleh RAT apakah dalam bentuk gratifikasi ataupun suap, serta tindak pidana pencucian uang, setelah harta jumbonya tercatat di LHKPN sebesar Rp 56,1 triliun. "Dia (Wahono) diundang klarifikasi, karena terkait dua perusahaan bersama istri RAT," ujar Pahala. Adapun untuk Andhi Pramono, diundang klarifikasi setelah kepemilikan rumah mewahnya viral bersamaan dengan foto-foto gaya hidup mewahnya di media sosial. Rumah mewah milik pria berharta Rp 13,7 miliar itu berlokasi di kawasan Cibubur. "Karena foto rumahnya yang aduhai itu plus ada yang pakaiannya yang apa tuh, enggak tau saya mereknya apa. Tapi ya karena itu saya mau nanya juga sambil cek juga benar enggak yang dilaporin itu hartanya," ujar Pahala. Pahala memastikan tim pemeriksa telah menyiapkan seluruh bukti dan rekam jejak dari dua pejabat di Kementerian Keuangan itu. Seluruh data dan rekam jejak ini turut dipadukan dengan hasil pengaduan masyarakat dan peninjauan langsung ke lokasi. "Kita sudah tahu dia sejarahnya dari mana saja, dari dia masuk PNS ke mana saja, kita sudah tahu, kita sudah tahu juga LHKPN nya, perkembangannya kayak apa dari tahun ke tahun," tutur Pahala. Pahala enggan menyimpulkan adanya dugaan gratifikasi yang diterima kedua

pejabat negara itu. Ia memastikan, seluruh proses klarifikasi yang dilaksanakan pekan depan akan menjadi bahan analisis KPK untuk menentukan kewajaran sumber pendapatan mereka. "Enggak tahu kita (gratifikasi), lihat aja nanti, kita minta banknya, rekening bank nya lagi kita minta nih, semua bank, asuransi kita minta, saham kita minta, ke BPN semua sertifikat atas nama beliau, istri, dan anak kita minta," ungkap pahala.